

ABSTRACT

Tujuan dari penulisan tesis ini ialah untuk mengkaji atau melihat adanya disharmonisasi ketentuan dari kepailitan dan arbitrase. Terutama tentang sengketa untuk mengadili, ketentuan dalam Kepailitan memberikan kewenangan untuk tetap memeriksa perkara sekalipun para pihak atau salah satu diantaranya terikat oleh Perjanjian Arbitrase. Begitu juga, Arbitrase juga mempunyai wewenang untuk memeriksa suatu sengketa diantara para pihak yang telah terikat oleh Perjanjian Arbitrase. Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga arbitrase ini memberikan ruang bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk memeriksa suatu perkara yang telah terikat oleh Perjanjian Arbitrase.

Perjanjian arbitrase tidak batal sekalipun salah satu atau para pihak dinyatakan insolvensi. Sedangkan, insolvensi merupakan hasil dari suatu rangkaian proses pemeriksaan atau putusan pailit. Sehingga, kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri haruslah diutamakan mengingat, tujuan dari kepailitan jauh lebih besar dibanding arbitrase, yaitu menjamin pembayaran atau pelunasan debitor terhadap para kreditor melalui asset atau harta pailit milik debitor yang akan dibayar melalui mekanisme sita untuk kemudian dilakukan dengan cara pelelangan.

Kata Kunci : Kepailitan, Arbitrase, Kewenangan Mengadili

ABSTRACT

The aim of this article is to find out discrepancy applied rules between bankruptcy law and arbitration law. Clearly stated in bankruptcy law that oneself is authorized to examine a case although the parties are attached to arbitration law, on the other hand for arbitration law regulates that oneself is also competent examining and district court has to state oneself is incapable of examining case, particularly law suit cases that is been submitted at the arbitration must be terminated at the time when the case has been put into verdict by the commercial court. Arbitration law points out that arbitration contract is can not be void even of insolvency is included. Insolvency itself is the result of bankruptcy procedures. Hence, by using statute approach, arbitration as an institution of law enforcement shall willingly pull out of examining cases that have been judged by commercial court in district court. Because, hereby, its importance is related to the purpose of bankruptcy which is to give "conservatoir beslag" for all the debtor assets in order to creditors' debt payment out of legal auction.

Keywords : bankruptcy, arbitration, authorized to examine